

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- AS., Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Bachar, Djazuli, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Budiarto, M, dkk, 2004, *Kamus Hukum Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Efendi, A'an, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Sociology Science Perspective*, dalam Soerjono Soekanto, *et. all.*, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , *American Law an Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2011, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- , 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandarsyah, Mudakir, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- ., 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Liberty, Yogyakarta.
- Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- ., 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Kedelapan, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Swantoro, Herri, 2019, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Wardana, Wisnu Arya, 1999, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/SK/KMA/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

C. Karya Ilmiah, Jurnal, dan Internet

Awiati, Wiwiek, *Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI Minggu V, FHUI, Jakarta.

Biro Humas KLHK, 26 Oktober 2018, *Siaran Pers KLHK Meminta Pengadilan Segera Eksekusi Perusahaan Perusak Hutan*, Jakarta.

- Boediono, Arief, 2011, “Pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) dan Hambatannya dalam Perspektif Perwujudan Kepastian Hukum di Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Tesis*, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Christiawan, Rio, 2018, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo”, *Jurnal Yudisial Vol. 11 Nomor 3 Desember 2018*, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.
- Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, 2018, *Tiga Tahun Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2017*, KLHK, Jakarta.
- Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, 2018, *Rencana Kerja 2019 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Jakarta.
- Hanafiah, Junaidi., 7 Agustus 2017, “Tidak Terima Putusan Pengadilan, PT Kallista Alam Balik Gugat Pemerintah”, <https://www.mongabay.co.id/2017/08/07/tidak-terima-putusan-pengadilan-pt-kallista-alam-gugat-pemerintah/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.
- , 30 Oktober 2017, “Eksekusi Kasus PT. Kallista Alam Tak Kunjung Dilakukan, Kenapa?”, <https://www.mongabay.co.id/2017/10/30/eksekusi-kasus-pt-kallista-alam-tak-kunjung-dilakukan-kenapa/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.
- , 19 Oktober 2018, “Putusan Pengadilan Meulaboh Dibatalkan, PT. Kallista Alam Tetap Didenda 366 Miliar”, <https://www.mongabay.co.id/2018/10/19/putusan-pengadilan-meulaboh-dibatalkan-pt-kallista-alam-tetap-didenda-366-miliar/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019.
- Hartini, Sri, Oktober 2017, “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Civics*, Volume 14 Nomor 2, Universitas Negeri Yogyakarta, Jakarta.
- ICEL, 2013-2019, “Tentang Kami”, <https://icel.or.id/>, diakses pada tanggal 10 April 2019.
- Imawati, Cahya, 2008, “Proses Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang dan Hambatan-Hambatannya di Pengadilan Negeri Sleman”, *Tesis*, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jebabun, Alfeus dkk., 2018, “Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia”, *International Development Law Organizatiton*, Jakarta.

Redaksi, 2 Maret 2019, “Mengenai Rencana Eksekusi Putusan Hukum Perusahaan Pelaku Karhutla, KLHK Sedang Ngejar MA dan Lacak Sampai ke Daerah Loh”, <http://sinarkeadilan.com/mengenai-rencana-eksekusi-putusan-hukum-perusahaan-pelaku-karhutla-klhk-sedang-ngejar-ma-dan-lacak-sampai-ke-daerah-loh/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Rinaldi, Yanis, 1998, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran di Wilayah Zona Industri Lhokseumawe”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supardi, 2004, “Ganti Rugi Akibat Pencemaran Oleh Perusahaan Industri di Muara Jawa”, *Tesis*, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum, 2005, “Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum”, BPHN, Jakarta.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/PK/Pdt/2014 Perihal Peninjauan Kembali Perkara PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa, 23 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651/K/Pdt/2015 Perihal Kasasi Perkara PT. Kallista Alam, 28 Agustus 2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460/K/Pdt/2016 Perihal Kasasi Perkara PT. Merbau Pelalawan Lestari, 18 Agustus 2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Pdt/2017 Perihal Peninjauan Kembali Perkara PT. Kallista Alam, 18 April 2017.